



PEMERINTAH KOTA SOLOK

**RENCANA KERJA
BAPPEDA TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA SOLOK
2018**



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20170 Fax. (0755) 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK
NOMOR : 188.4/ /KPTS/BAPPEDA-2018

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(RENJA-BAPPEDA) KOTA SOLOK TAHUN 2019**

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019 telah disahkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45- Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota tersebut, maka Kepala Bappeda harus menetapkan Renja Bappeda menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

16. Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;
17. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2019.

Memperhatikan : Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45- Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kota Solok Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk tahun 2019.
- KEDUA** : Renja Bappeda sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini merupakan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2019.
- KETIGA** : Dokumen Renja Bappeda merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : Juli 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,



JONEDI, SH, MM
NIP. 19640614 199203 1 008

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2019 ini mengacu pada Program dan Kegiatan pada Renstra Bappeda tahun ke-4 dengan beberapa penyesuaian sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungan dan pencapaian indikator yang ditetapkan dalam Renstra.

Renja Bappeda Tahun 2019 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Renja merupakan dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2019. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja PD tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program dan kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Solok, Juli 2018
KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK


JONEDI, SH, MM
NIP. 19640614 199203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Solok mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Bappeda merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam RKPD, KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2019.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Bappeda Tahun 2019 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, antara lain:

1. Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021;

4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;
5. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2019 dimaksudkan sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPD, KUA – PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Kota Solok Tahun 2019 serta panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2019 ini adalah sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2019 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, yang berisi penjelasan mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja dilakukan untuk menelaah setiap hasil yang telah direncanakan, sekaligus sebagai alat untuk memperbaiki perencanaan program/ kegiatan yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Solok Tahun 2019 ini, yang dievaluasi adalah pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan pencapaian Renstra tahun 2017. Secara umum, selama tahun 2017, Bappeda Kota Solok melaksanakan 11 program dengan 39 kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bappeda didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp.5.399.837.250,-.

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia, yang terealisasi selama tahun 2017 adalah sebesar Rp.4.497.132.510,- yaitu 83,28% dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 98,79%. Secara rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini dan tabel T-C.29 yang menjadi lampiran dari dokumen ini.

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan jasa surat menyurat. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terkirimnya surat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Penyediaan jasa surat menyurat telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.2.670.000,- (89,00%). Tidak ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.219.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan fasilitas komunikasi dan sumber daya listrik. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan sumber daya listrik kantor.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.135.206.431,- (61,74%).

Realisasi keuangan pada kegiatan ini rendah karena anggaran yang disahkan tidak sama dengan Renja yaitu hanya Rp. 189.000.000,- setelah disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.22.200.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan jasa bagi pengelola administrasi keuangan dan asset. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan administrasi keuangan dan asset.

Penyediaan jasa keuangan telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.16.650.000,- (75,00%).

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.66.440.500,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan kelancaran operasional administrasi kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor yang memadai.

Penyediaan alat tulis kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.62.350.500,- (93,84%).

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.38.750.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan kelancaran operasional administrasi kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.24.660.800,- (63,64%). Capaian realisasi keuangan termasuk rendah karena adanya efisiensi anggaran.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.791.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor dan jaringan/instalasi listrik agar operasional kantor berjalan dengan lancar. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya komponen alat-alat listrik dan elektronik.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.7.191.000,- (124,17%). Realisasi anggaran melebihi rencana karena setelah dilakukan analisa kebutuhan saat berjalannya kegiatan diketahui bahwa adanya

kekurangan pada anggaran yang telah direncanakan, sehingga anggaran untuk kegiatan ini ditambah menjadi Rp.7.611.000,-.

7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada Renja Bappeda tahun 2017 telah dianggarkan dana sebesar Rp.7.550.000,-. Namun kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena selaras dengan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.413.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Penyediaan peralatan rumah tangga telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.30.418.000,-. Realisasi anggaran jauh diatas rencana karena adanya beberapa kebutuhan mendesak yang tidak teranggarkan saat disusunnya Renja tahun 2017.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.26.020.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kantor, dan terlayannya tamu Bappeda. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minuman harian, makan dan minuman rapat kantor, serta makan dan minuman tamu.

Penyediaan makanan dan minuman telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.22.943.000,- (88,17%).

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.420.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya koordinasi tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.455.466.826,- (108,44%). Realisasi keuangan melebihi rencana dikarenakan padatnya kegiatan koordinasi pada tahun 2017 sehingga dibutuhkan tambahan anggaran.

11. Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.233.931.500,- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi kerja dan disiplin PNS, pengelola barang dan kearsipan, pegawai kontrak dan Sopir. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan PNS dan Non PNS melalui pemberian uang lembur dan honor.

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.326.371.000,- (139,51%). Realisasi anggaran melebihi rencana karena adanya penambahan pegawai non SK Wako serta karena padatnya kegiatan, sehingga diperlukan tambahan uang lembur.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.100.090.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan kantor yang memadai. Pengadaan perlengkapan gedung kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.99.797.000,- (99,71%).

2. Pengadaan Mebeleur

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.61.090.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya mebeleur kantor yang memadai.

Pengadaan mebeleur kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.49.742.000,- (81,42%).

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.61.150.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kenyamanan gedung kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah perbaikan gedung kantor pada bagian-bagian tertentu. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.279.840.000,-. Realisasi anggaran kegiatan ini jauh melebihi rencana karena adanya kebutuhan perbaikan WC dan pembuatan taman kantor.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.105.303.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.99.587.017,- (94,57%).

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.47.500.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.16.002.000,- (33,69%). Realisasi anggaran sangat rendah karena peralatan gedung kantor pada tahun ini belum memerlukan pemeliharaan yang berarti.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.30.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan disiplin aparatur khususnya disiplin dalam berpakaian. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas bagi aparatur Bappeda.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.31.000.000,- (103,33%). Realisasi anggaran melebihi rencana karena menyesuaikan dengan kebutuhan.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.159.108.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur perencana. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kemampuan khususnya di bidang perencanaan. Pendidikan dan pelatihan formal telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi anggaran Rp.123.736.460,- (77,77%).

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.500.000,-. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD adalah tergambarinya realisasi dan kondisi capaian kinerja SKPD yang terukur berdasarkan penerimaan dan pengeluaran keuangan SKPD dan disusun berdasarkan rincian objek (sub rekening). Sasaran dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD adalah terlaksananya penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD setiap bulan, semesteran beserta prognosis enam bulan berikutnya dan akhir tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.3.671.000,- (104,88%). Kelebihan pada realisasi anggaran terjadi karena adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

f) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Penyusunan Profil Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.48.058.500,-. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan buku profil daerah Kota Solok. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan ketersediaan data dan akurasi data perencanaan dan pembangunan daerah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.317.000,- (85,97%).

2. Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.89.852.500,- dengan tujuan menyajikan basis data/ informasi yang variatif, terukur, dan bertanggung jawab guna mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratis, dan mendukung data dan informasi dalam menyusun arah dan kebijakan pembangunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan ini, yaitu :

1. Terlaksananya forum data dan SIPD Kota Solok.
2. Terlaksananya penyusunan buku database perencanaan pembangunan daerah dalam rangka updating data kebutuhan SIPD online.
3. Terlaksananya penyusunan dokumen indikator makro ekonomi terpilih daerah.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan Pembangunan Daerah telah dapat dilaksanakan 98% dari yang direncanakan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.62.134.489,- (69,15%). Realisasi fisik tidak mencapai 100% karena rapat tim forum data dan SIPD yang direncanakan 5 kali hanya terlaksana 4 kali.

3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.333.710.000,- dengan tujuan pengembangan penggunaan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sasaran dari Kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi perencanaan melalui sistem yang dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholders untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kegiatan ini terlaksana 94% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.198.644.000,- (59,53%). Realisasi fisik tidak sampai 100% karena updating website Bappeda yang direncanakan 6 kali hanya terlaksana 3 kali.

g) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.75.000.000,- . Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga benar-benar mampu memberi manfaat bagi masyarakat.

Realisasi fisik pada kegiatan ini telah tercapai sebesar 92,50%. Output yang belum terlaksana yaitu rapat koordinasi yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, sampai akhir periode pelaksanaan kegiatan hanya terealisasi sebanyak 1 kali, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.349.847.600,-. Realisasi anggaran jauh melebihi rencana karena adanya penambahan output yaitu sharing informasi perencanaan pembangunan.

2. Penyusunan Rancangan RPJPD

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.604.630.000,-. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya rancangan perubahan

RPJPD tahun 2005-2025. Namun karena keterbatasan waktu dan penyusunan perubahan RPJPD ini serentak dengan penyusunan Perubahan RPJMD, sehingga untuk tahun 2017, output kegiatan ini digeser menjadi penyediaan dokumen evaluasi RPJPD serta workshop dan sosialisasi RPJPD, belum sampai pada rancangan perubahan RPJPD.

Realisasi fisik pada kegiatan ini telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.370.729.210,- (61,31%).

3. Penyelenggaraan Musrebang RPJPD

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.117.836.000,-. Tujuannya adalah untuk melaksanakan musrenbang perubahan RPJPD Tahun 2005-2025. Namun karena rancangan Perubahan RPJPD belum tersedia, maka penyelenggaraan Musrenbang RPJPD tidak jadi dilaksanakan.

4. Penetapan RPJPD

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp196.852.500,-. Namun kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena rancangan perubahan RPJPD belum ada.

5. Penyusunan Rancangan RPJMD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk Menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagai akibat dari dikeluarkannya Perda Kota Solok Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun yang memberikan arah pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih.

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Teridentifikasinya Kondisi Umum, Isu Strategis Tantangan dan Potensi pembangunan jangka menengah (5 tahun) di Kota Solok;
2. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah (5 tahun) di Kota Solok;
3. Tersusunnya konsep pembangunan jangka menengah (5 tahun) Kota Solok, yang dilandasi hasil analisis dan kajian dalam proses perencanaan;

4. Teridentifikasinya sektor unggulan Kota Solok yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
5. Tersusunnya arahan kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah (5 tahun) Kota Solok; serta
6. Tersusunnya indikasi program pembangunan jangka menengah (5 tahun) secara terpadu di Kota Solok.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.198.892.990,- (79,56%).

6. Penetapan RPJMD

Kegiatan ini tidak direncanakan pada Renja Bappeda tahun 2017. Namun karena dikeluarkannya Perda Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah merumuskan rancangan akhir perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 untuk dibahas dengan DPRD menjadi Peraturan Daerah.

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.316.708.070,-.

7. Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD ini dianggarkan sebesar Rp.102.392.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kota Solok sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kota Solok Tahun 2018 sebagai dasar untuk penyusunan KUA/PPAS Tahun 2018.

Kegiatan Penyusunan RKPD telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.98.466.560,- (96,17%). Terdapatnya sisa anggaran pada beberapa rekening belanja kegiatan yang disebabkan karena adanya efisiensi dan penyesuaian terhadap kebutuhan.

8. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.746.500,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi
- Mengklarifikasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan/atau usulan lain yang masuk sebelum musrenbang Kota dilaksanakan
- Menyepakati program dan kegiatan prioritas pembangunan pada tahun rencana dengan mempedomani prioritas pembangunan daerah
- Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas pembangunan pada tahun rencana

Sasaran dari kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018 adalah :

- Terhimpunnya masukan-masukan dalam forum Musrenbang Kota untuk penyempurnaan rancangan RKPD
- Tersusunnya prioritas program/kegiatan pembangunan Kota Solok Tahun 2018

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi anggaran Rp.97.262.000,- (81,91%).

9. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.890.000,-.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kemajuan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan Non APBD (APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya), permasalahan yang dihadapi beserta tindak lanjut pemecahan masalah dan memberikan informasi tentang berbagai capaian, keberhasilan dan kemajuan yang dicapai Kota Solok termasuk berbagai program pembangunan selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD dan APBD dan Non APBD Kota (APBD Propinsi APBN dan sumber dana lainnya).

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.40.234.300,- (91,67%). Realisasi fisik tidak mencapai 100% karena rapat monev DAK / Non APBD yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 5 kali hanya terlaksana 4 kali saja.

10. Penyusunan Perubahan RKPD

Kegiatan ini dianggarkan pada APBD tahun 2017 sebesar Rp.30.450.000,-.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Menyesuaikan asumsi dasar RKPD dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran baik antar unit organisasi antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
- c. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Perubahan APBD Tahun 2017.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersedianya Perwako Perubahan RKPD Tahun 2017 dan rancangan perubahan APBD 2017. Kegiatan Perubahan RKPD telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.308.100,- (96,25%).

11. Evaluasi RKPD

Kegiatan ini dianggarkan pada APBD tahun 2017 sebesar Rp.76.879.500,-

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Untuk memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD tahun 2016 dan RKPD tahun 2017 per semester I tahun berjalan.
- Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan tahun 2017 per semester I.
- Merumuskan rekomendasi dan saran tindak untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- Sebagai pedoman penyusunan RKPD 2018

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Evaluasi RKPD adalah:

- Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Semester II tahun 2016.
- Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Semester I tahun 2017.
- Tersedianya data pendukung hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD semester I dan III Tahun 2017

Kegiatan Evaluasi RKPD telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.76.866.270,- (99,98%).

h) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dibidang Ekonomi

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.127.405.750,-. Tujuan dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ini adalah untuk melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dengan unit kerja terkait di Kota Solok, dan terfasilitasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan PD terkait di Tingkat Propinsi dan Pusat.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terkoordinirnya perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dengan unit kerja terkait di Kota Solok. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.109.394.740,- (85,86%).

i) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.126.896.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan unit kerja PD terkait di Kota Solok dan dengan PD terkait ditingkat Propinsi dan Pusat, serta terlaksananya pendampingan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan partisipatif khususnya bidang sosial budaya.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terkoordinirnya perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan PD terkait di lingkup bidang Sosial Budaya baik di kota, propinsi dan di pusat serta meningkatnya peran serta dan koordinasi *stakeholder* dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Kegiatan ini telah dilaksanakan 90% dengan realisasi anggaran Rp.121.572.300,- (95,80%). Capaian realisasi fisik pada kegiatan ini tidak sampai 100% karena rapat koordinasi yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali hanya terlaksana 1 kali karena tidak ada permasalahan lintas PD yang perlu dikoordinasikan lagi didalam forum.

2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.926.500,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan
- b. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
- c. Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
- b. Menurunnya Jumlah penduduk miskin

Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.81.237.920,- (140,24%). Realisasi anggaran jauh melebihi rencana karena adanya penyesuaian kembali dengan kebutuhan kegiatan.

j) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1. Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.439.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sinergitas antar instansi terkait dalam rangka menterpadukan dan mengarahkan serta mensinkronkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan sarana wilayah. Kegiatan ini telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.132.019.394,- (45,45%). Realisasi Keuangan pada kegiatan ini sangat rendah karena adanya penyesuaian dengan kebutuhan kegiatan.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kab/kota dianggarkan sebesar Rp.101.725.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Kegiatan ini telah terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.769.390,- (80,38%).

3. Koordinasi Perencanaan Perumahan Permukiman

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perumahan Permukiman dianggarkan sebesar Rp.57.643.500,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mendorong komitmen Pemerintah Kota dalam menyusun program investasi infrastruktur jangka menengah bidang cipta karya dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan adalah terintegrasinya pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Kegiatan ini terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.165.853.160,-. Realisasi anggaran jauh melebihi rencana karena adanya

penyusunan review dokumen RPIJM yang membutuhkan dana melebihi yang telah direncanakan sebelumnya.

k) Program Perencanaan Tata Ruang

1. Revisi Rencana Tata Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.401.667.000,- dengan tujuan melaksanakan peninjauan kembali RTRW Kota Solok Tahun 2012-2031. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang.

Kegiatan ini telah dapat dilaksanakan 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.137.571.983,- setelah menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Secara umum, Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Persentase ketersediaan data perencanaan dan pembangunan daerah

Target ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017, berdasarkan elemen data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang telah berganti nama menjadi e-database dalam rangka menindaklanjuti amanat pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah 1.100 data, dari yang dibutuhkan sebanyak 1.539 data atau sebanyak 71%. Sedangkan realisasi ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah yang dapat dipenuhi sebanyak 1.100 data atau dengan capaian indikator ketersediaan data 100%. Capaian tahun 2017 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang hanya sebesar 98,90%.

2) Persentase Akurasi data perencanaan dan pembangunan daerah

Target akurasi data perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017 adalah sebanyak 990 data dari 1.100 data yang tersedia atau 90%. Adapun keakurasian data perencanaan pembangunan daerah yang dapat direalisasikan pada Tahun 2017, adalah sebanyak 865 data dari 1.100 data yang tersedia atau 79% sehingga capaian kinerja sasaran akurasi data Tahun 2017 sebesar 87,78%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, maka capaian kinerja akurasi data Tahun 2017 relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja akurasi data Tahun 2016 sebesar 91,95%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur database SIPD sesuai amanat Pasal 274 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dari struktur SIPD sebelumnya yang dikategorikan menurut 8 kelompok dan 31 jenis data sesuai surat Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Nomor : 050/ 3320/ Bangda perihal Petunjuk Pengelolaan e-Database Tanggal 7 Agustus 2017 sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam pengentrian ulang SIPD baru, verifikasi dan validasi data.

3) Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Pada tahun 2017 ditargetkan seluruh dokumen perencanaan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan agenda pemerintahan daerah. Terdapat 4 (empat) Dokumen perencanaan yang

ditargetkan untuk diselesaikan tahun 2017, yaitu RKPd Tahun 2018, Perubahan RKPd 2017, Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 dan perubahan RPJPD kota Solok tahun 2005-2025. Dari 4 (empat) dokumen tersebut, 3 (tiga) dokumen dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sedangkan satu dokumen lagi tidak dapat diselesaikan di tahun 2017 yaitu dokumen perubahan RPJPD kota Solok tahun 2005-2025. Penyusunan RPJPD ini diundur di tahun 2018 karena tahun 2017 difokuskan untuk melaksanakan evaluasi terhadap RPJPD kota Solok dan menyelesaikan perubahan RPJMD kota Solok tahun 2016-2021. Dengan demikian, persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun 2017 hanya 75%.

4) Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang sesuai juknis

Penyelenggaraan musrenbang kelurahan diharapkan telah mengikuti petunjuk teknis yang ada agar tujuan dari dilaksanakannya musrenbang ini dapat tercapai 100% sehingga mampu memberi manfaat dan hasil yang maksimal bagi pembangunan di masing-masing kelurahan.

Dari 13 (tiga belas) kelurahan yang telah melaksanakan Musrenbang pada tahun 2017, seluruhnya telah menyelenggarakan musrenbang dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persentase kelurahan yang menyelenggarakan musrenbang sesuai juknis telah mencapai 100%.

5) Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dilakukan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 Tahun 2015, tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Dari penilaian terhadap lima komponen tersebut, Bappeda memperoleh nilai A untuk evaluasi tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 belum dilakukan evaluasi.

6) Persentase Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang Selaras dengan RPJMD

Rencana Strategis PD disusun berdasarkan dan berpedoman pada dokumen RPJMD, sehingga apa yang terdapat dalam Renstra harus selaras dengan apa yang ada dalam RPJMD. Tingkat keselarasan tersebut dapat diukur melalui ; keselarasan sasaran, keselarasan indikator sasaran, keselarasan target sasaran, keselarasan program, keselarasan indikator program dan keselarasan target program.

Pada tahun 2017, persentase dokumen Renstra PD yang selaras dengan RPJMD ditargetkan 95%. Pada tahun ini Penyusunan Renstra PD sejalan dengan penyusunan perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Apa yang tertuang dalam renstra langsung diakomodir dalam RPJMD sehingga dapat dikatakan bahwa Renstra PD yang selaras dengan RPJMD telah mencapai 100%.

7) Persentase dokumen Renja PD yang selaras dengan RKPD

Renja PD disusun berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD. Dengan begitu penyusunan Renja harus selaras dengan RKPD. Indikator yang diukur terkait keselarasan tersebut adalah persentase dokumen Renja PD yang selaras dengan RKPD. Target ini pada tahun 2017 adalah 95%. Dari 30 PD yang menyusun Renja pada tahun 2017, telah dilakukan verifikasi dan perbaikan agar selaras dengan RKPD. Sehingga realisasi dari indikator ini telah mencapai 100%.

8) Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Pada akhir tahun 2016 telah ditetapkan RPJMD kota Solok tahun 2016-2021. Namun dengan dikeluarkannya Perda Kota Solok nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pada RPJMD kota Solok tahun 2016-2021. Penyesuaian ini sebelumnya telah dilakukan pula terhadap RKPD kota Solok tahun 2017. Agar kedua dokumen tersebut tetap saling memiliki keterkaitan maka apa yang telah tertuang dalam perubahan RPKD Kota Solok Tahun 2017 otomatis langsung diakomodasi dalam perubahan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021. Dengan begitu maka dokumen RKPD telah selaras dengan dokumen RPJMD.

9) Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD

Indikator tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD ditentukan dengan membandingkan jumlah indikator sasaran strategis yang mencapai target dengan jumlah total indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Indikator sasaran strategis seluruhnya berjumlah 43 indikator. Target yang hendak dicapai pada tahun 2017 sebanyak 80%.

Pada tahun 2017, jumlah indikator sasaran RPJMD yang dapat mencapai target adalah sebanyak 23 indikator, dengan demikian realisasi tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD adalah 53,49% dengan capaian kinerja tahun 2016 adalah 76,41%. Penyebab belum tercapainya semua indikator sasaran RPJMD antara lain adanya beberapa indikator yang belum tersedia datanya

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

Bappeda Kota Solok dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Solok nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan peraturan daerah. Perda ini di susun untuk menindaklanjuti Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda tersebut juga memutuskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, juga disusun Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah. Berdasarkan Perwako tersebut, Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi yang dilaksanakan Bappeda antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dilingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dilingkup perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Bappeda di dukung oleh susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbag umum dan kepegawaian
 2. Subbag keuangan
 3. Subbag program, evaluasi dan pelaporan
- c. Bidang ekonomi, membawahi :
 1. Subbid pertanian
 2. Subbid penanaman modal dan ketenagakerjaan
 3. Subbid koperasi, industri perdagangan dan pariwisata
- d. Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, membawahi :
 1. Subbid infrastruktur
 2. Subbid pengembangan wilayah dan permukiman
 3. Subbid perumahan dan permukiman
- e. Bidang sosial dan budaya, membawahi :
 1. Subbid pemerintahan
 2. Subbid pengembangan SDM dan budaya
 3. Subbid sosial dan kependudukan
- f. Bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, membawahi :
 1. Subbid perencanaan pembangunan pembangunan daerah
 2. Subbid data dan informasi
 3. Subbid monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Secara struktur organisasi, saat ini Bappeda mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional perencana belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum mencukupinya SDM yang tersedia di Bappeda
2. Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholders;
3. Belum digunakannya data dan informasi pembangunan secara optimal;
4. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
5. Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Bappeda Kota Solok Tahun 2019, Program Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda tahun 2016-2021, yang selanjutnya akan diselaraskan dengan RKPD kota Solok tahun 2019.

2.5 Penelaahan Usulan Prgram dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, tetapi Bappeda mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menyangkut dengan masyarakat. Dalam pelaksanaanya Bappeda Kota Solok akan menampung

usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila maka pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi **Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021, maka tujuan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kota Solok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda

4. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan
5. Tercapainya sasaran strategis RPJMD

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2019
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Peringkat penilaian anugerah pangripta nusantara	1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase ketersediaan data perencanaan dan pembangunan daerah	97%
				Persentase akurasi data perencanaan dan pembangunan daerah	92%
			2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%
				Persentase kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang sesuai juknis	100%
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Evaluasi AKIP	BB			
2	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan	Persentase dokumen Renstra PD yang selaras dengan RPJMD	-
				Persentase dokumen Renja PD yang selaras dengan RKPd	95%
				Persentase dokumen RKPd yang selaras dengan RPJMD	100%
			2. Tercapainya sasaran strategis RPJMD	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	87%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan Bappeda tahun 2019 merupakan rumusan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu pada misi kedua “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Reformasi Birokrasi”. Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2019 Bappeda akan melaksanakan 13 Program dan 38 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,-. Berikut rincian program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 :

1) Program pada Setiap Perangkat Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan mebeleur
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program Peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

- 5) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 1. Penyusunan laporan kinerja keuangan
- 6) Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**
 1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
- 7) Program Perencanaan pembangunan daerah**
 1. Penyusunan rancangan RKPD
 2. Penyusunan perubahan RKPD
- 8) Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
 1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 2. Pengendalian dan Evaluasi RKPD
 3. Evaluasi RPJMD
- 9) Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan**
 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
- 10) Program Perencanaan pembangunan Ekonomi**
 1. Sinergi perencanaan pembangunan ekonomi
 2. Data dan Analisa ekonomi
 3. Koordinasi perencanaan penanaman modal dan tenaga kerja
- 11) Program Perencanaan pembangunan sosial dan budaya**
 1. Sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya
 2. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
- 12) Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**
 1. Sinergi perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 2. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup
 3. Koordinasi perencanaan perumahan permukiman
- 13) Program Pengembangan data/ Informasi**

1. Penyusunan profil daerah
2. Penyusunan dan pengumpulan database perencanaan pembangunan daerah
3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

Rincian pendanaan pada setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut ini :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
	BAPPEDA								
	PLAFON 2019				5,150,000,000				-
	USULAN RENJA				5,150,000,000				5,655,890,000
	KELEBIHAN DARI PLAFON 2019								5,655,890,000
	PROGRAM PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH				1,807,550,000				2,062,130,000
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1,161,150,000			100%	1,331,000,000
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah Materai 6000 - Jumlah Materai 3000 - Benda pos lainnya	Bappeda	300 buah 250 buah 9 paket	3,500,000	APBD		300 buah 350 buah 1 disediakan	3,500,000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Rekening telepon - Rekening Listrik	Bappeda	12 bulan 12 bulan	219,000,000	APBD		12 bulan	225,000,000
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	- honor bendaharawan pengeluaran - honor Pembantu bendahara pengeluaran	Bappeda	12 OB 24 OB	22,200,000	APBD		12 bulan	22,200,000
	4 Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	Bappeda	4 paket	66,440,500	APBD		12 bulan	76,440,500
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan Penggandaan	Bappeda	6 paket 155.000 lembar	38,750,000	APBD		12 bulan	40,000,000
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bappeda	2 paket	5,791,000	APBD		12 bulan	6,311,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Saluran Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
	7 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kerjasama pihak ketiga kebersihan kantor	Bappeda	1 paket	120,000,000	APBD		12 bulan	140,000,000
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda	20 jenis	7,000,000	APBD			-
	9 Penyediaan makanan dan minuman	- makan minum tamu - makan minum rapat - Air galon - Air mineral	Bappeda	150 kotak 300 bungkus 220 galon 30 dus	27,000,000	APBD		12 bulan	29,000,000
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Koordinasi dan konsultasi keluar daerah -	Bappeda	12 bulan	411,468,500	APBD		12 bulan	516,135,500
	11 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Pembayaran : - Uang lembur - Honor pengelola barang - Honor pegawai kontrak dan sopir - Honor pegawai non SK Wako	Bappeda	12 bulan 12 OB 130 OB 117 OB	240,000,000	APBD		12 bulan	272,413,000
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	475,400,000			100%	483,900,000
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	- Laptop - Komputer - Printer - TV - UPS - LCD - AC - Mesin tik	Bappeda		99,900,000	APBD		2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 2 unit	183,900,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Uraian Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		- Kamera						1 unit	
2.	Pengadaan mebeleur	-	Bappeda		66,000,000	APBD			50,000,000
		-							
		-							
		-							
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Bappeda	1 paket	170,000,000	APBD		1 paket	100,000,000
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Bappeda		92,000,000	APBD			100,000,000
		- Kendaraan operasional roda 4		4 unit				3 unit	
		- Kendaraan operasional roda 2		8 unit				8 unit	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Bappeda	12 bulan	47,500,000	APBD		12 bulan	50,000,000
6	Pengadaan kendaraan dinas	- Roda 4	Bappeda	2 unit					
		Roda 2		8 unit					
3.	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian		0%	40,000,000			0%	40,000,000
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Pakaian Dinas	Bappeda	56 stel	40,000,000	APBD		54 stel	40,000,000
		- Pakaian Muslim		56 stel				54 stel	
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur		100%	125,000,000			100%	200,000,000
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur perencana untuk mengikuti diklat formal	Bappeda	24 orang	125,000,000	APBD		12 bulan	200,000,000
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	6,000,000		Amat Baik	100%	7,230,000
		- Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi		BB			A		

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Satuan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		Pemerintah (AKIP)							
		- Tingkat Kematangan Implementasi SPIP		Level 3			Level 3		
		- Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi		100%			100%		
		- Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD		90%			90%		
	1 Penyusunan laporan kinerja keuangan		Bappeda		6,000,000	APBD			7,230,000
		- Laporan capaian kinerja PD dan		12 dok				2 dok	
		- Laporan akhir tahun keuangan		1 dok					
		- Laporan semesteran		1 dok				1 dok	
		- Laporan triwulan keuangan		3 dok					
		- Laporan kinerja PD		1 dok				1 dok	
		- LKPj dan LPPD PD		2 dok				2 dok	
		- Laporan evaluasi Renja		4 dok					
		- Renja Bappeda 2020		1 dok					
		- Perubahan Renja Bappeda 2019		1 dok					
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	- Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan			250,000,000				300,000,000
	1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	- Jumlah aparatur perencanaan Bappeda yang ditingkatkan kapasitas pemahamannya terhadap perencanaan	Kota Solok	36 orang	250,000,000	APBD		36 orang	300,000,000
								31 orang	
7.	Perencanaan pembangunan daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan		100%	750,000,000			100%	157,660,000
		- Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD		100%				100%	
		- Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD		73%				75%	
	1 Penyusunan rancangan RKPD	- Dokumen Rancangan awal RKPD tahun 2020	Kota Solok	1 dokumen	362,886,000	APBD		1 dokumen	118,530,000
		- Dokumen Rancangan RKPD tahun 2020		1 dokumen				1 dokumen	

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Saluran Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		- Dokumen RKPD tahun 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		- Konsultasi publik Ranwal RKPD		1 kali				1 kali	
		- Verifikasi Rancangan Rancangan Renja PD		30 PD				30 PD	
		- Verifikasi Usulan DAK Fisik 2020		1 keg.				1 keg.	
	2 Penyusunan perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2019	Kota Solok	1 dokumen	85,574,000	APBD		1 dokumen	39,130,000
	3 Penyusunan Rancangan RPJMD	- Rancangan akhir perubahan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021	Kota Solok	1 dokumen	163,000,000	APBD		-	
	4 Penetapan RPJMD	- Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD	Kota Solok	1 dokumen	138,540,000	APBD		-	
		- Penetapan renstra PD		30 OPD					
8.	Pengendalian dan Evaluasi	- Persentase capaian kinerja kegiatan non APBD dan DAK		92%	346,060,000	-	-	-	350,500,000
	Perencanaan Pembangunan Daerah								
	1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	- Rakor dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana non APBD dan DAK	Kota Solok	5 kali	126,268,000	APBD		5 kali	126,200,000
		- Penyusunan dokumen pendukung evaluasi pelaksanaan pembangunan		40 exp				40 exp	
		- Monitoring dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana non APBD dan DAK		4 dok				4 dok	
	2 Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD	Kota Solok	1 dok	125,592,000	APBD		1 dok	130,000,000
		Laporan pengendalian kebijakan RKPD		1 dok				1 dok	
		laporan pengendalian pelaksanaan RKPD dan Renja		1 dok				1 dok	
		Evaluasi hasil RKPD		2 dok				2 dok	
	3 Evaluasi RPJMD	Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) terhadap pelaksanaan RPJMD 2016-2021	Kota Solok	1 dokumen	94,200,000	APBD		1 dokumen	94,300,000
9.	Peningkatan Partisipasi masyarakat	- Persentase partisipasi komponen masyarakat		72%	200,000,000			75%	195,290,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Saluran Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
	dalam perencanaan pembangunan	dalam proses perencanaan pembangunan tahunan							
	1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok Tahun 2020	Kota Solok	1 kali	100,000,000	APBD		1 kali	195,290,000
	2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021	Kota Solok	1 kali	100,000,000				
10.	Perencanaan pembangunan Ekonomi	- Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah lingkup ekonomi		-	491,700,000			-	495,500,000
		- Persentase kesesuaian program/kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra lingkup bidang ekonomi		100%				100%	
		- Persentase penjabaran program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah lingkup ekonomi		100%				100%	
		- Jumlah dokumen pendukung bidang ekonomi		1 dok				1 dok	
	1 Sinergi perencanaan pembangunan ekonomi	Rapat Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan	Kota Solok	4 kali	161,700,000	APBD			180,000,000
		Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bidang Ekonomi		13 kelurahan 2 Kecamatan					
		Verifikasi dan Penajaman renja perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi		5 PD					
		- Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi		1 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Action Plan Kawasan Pertanian		1 Dokumen					
	2 Koordinasi Perencanaan, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi UKM dan Industri	- Rakor perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perdagangan, pariwisata, koperasi UKM dan Industri	Kota Solok	4 kali	220,000,000	APBD		1 dokumen	215,500,000
		- Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kota Solok		1 dokumen				2 dokumen	
	3 Koordinasi perencanaan penanaman modal dan tenaga kerja	- Rakor perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan penanaman modal dan tenaga kerja	Kota Solok	4 kali	110,000,000	APBD		6 kali	100,000,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Saluran Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
11.	Perencanaan pembangunan sosial dan budaya	- Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah lingkup Sosbud		-	372,110,000			-	475,000,000
		- Persentase kesesuaian program/kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra lingkup bidang Sosbud		100%				100%	
		- Persentase penjabaran program RKPd ke dalam Renja Perangkat Daerah lingkup bidang Sosbud		100%				100%	
		- Jumlah dokumen pendukung bidang Sosbud		1 dok				2 dok	
		- Persentase implementasi program penanggulangan Kemiskinan		100%				100%	
	1 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan		Kota Solok		155,000,000	APBD			160,000,000
		- Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang pemerintahan		2 kali				4 kali	
		- Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bidang sosial budaya		13 kel, 2 kec, 6 PD				2kec/13 kel	
		- Verifikasi renja PD lingkup bidang pemerintahan		13 PD					
	2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	- Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2018	Kota Solok	1 dokumen	105,000,000	APBD		1 dokumen	115,000,000
		- Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		4 kali				4 kali	
		- Survey Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan		1 kali					
		- Aplikasi Informasi kemiskinan		1 paket					
	3 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya	- Verifikasi Renja Perangkat Daerah lingkup Sosial dan Budaya	Kota Solok	7 PD	112,110,000	APBD			200,000,000
		- Rapat koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan lingkup Pengembangan SDM dan budaya		6 kali					
12.	Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	- Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang IPW		-	574,580,000	-	-	-	627,250,000
		- Persentase kesesuaian program/kegiatan Renja Perangkat		100%				100%	

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Satuan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		Daerah terhadap Renstra lingkup bidang IPW							
		- Persentase penjabaran program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah lingkup bidang IPW		100%				100%	
		- Jumlah dokumen pendukung bidang IPW		1 dok				1 dok	
	1 Sinergi perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang prasarana dan sarana wilayah	Kota Solok	4 kali	234,380,000	APBD		4 kali	257,960,000
		- Verifikasi Renja perangkat daerah lingkup bidang prasarana wilayah		4 PD				4 PD	
		- Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bidang prasarana wilayah		2 Kec/13 Kel				2 Kec/13 Kel	
		- Fasilitasi komisi irigasi		1 tahun				1 tahun	
	2 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup	- Rapat-rapat koordinasi penataan ruang dan lingkungan hidup	Kota Solok	4 kali	130,000,000	APBD		4 kali	160,000,000
		- Pelatihan GIS		25 orang				25 orang	
	3 Koordinasi perencanaan perumahan permukiman	- Koordinasi perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Kota Solok	8 kali	210,200,000	APBD		8 kali	209,290,000
13.	Pengembangan data/ Informasi	- Persentase implementasi e-planning		100%	358,000,000			100%	992,560,000
		- Jumlah elemen database perencanaan pembangunan sesuai aturan		1901 elemen				1901 elemen	
	1 Penyusunan profil daerah dan visualiasi perencanaan	- Buku Profil Daerah	Kota Solok	1 dokumen	90,000,000	APBD			-
		- Video animasi perencanaan pembangunan		1 paket					
	2 Penyusunan dan pengumpulan database perencanaan pembangunan daerah	- SIPD Kota Solok	Kota Solok	1 tahun	70,000,000	APBD			242,560,000
		- Buku database perencanaan pembangunan daerah		30 eks				30 eks	
		- Forum data tingkat kota		3 kali					

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	Saluran Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
	3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	- implementasi e-planning - pemeliharaan website Bappeda	Kota Solok	1 paket 1 paket	198,000,000	APBD			750,000,000

BAB V

PENUTUP

Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2019 dan merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2019 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparat Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Bappeda Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2019, dimana Renja Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergi, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, seluruh aparat Bappeda secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2019.

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Perangkat Daerah : Bappeda
 Program : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/ Data Dasar Base Line	Target Kinerja/ Indikator Gender
<p>Program : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</p> <p>Tujuan : Penyempurnaan Rancangan RKPD</p>	<p>- Usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan tahun 2018 berjumlah 625 Usulan</p> <p>- Stakeholders yang terlibat dalam musrenbang RKPD berjumlah 101 stakeholder</p> <p>Organisasi perempuan yang diundang dalam Musrenbang RKPD berjumlah 6 organisasi</p> <p>- Fasilitator perencana laki-laki berjumlah 27 orang</p> <p>- Fasilitator perencana perempuan berjumlah 18 orang</p> <p>- Aparatur perencana Bappeda berjumlah 32 orang</p> <p>- Proyeksi kemampuan keuangan untuk membiayai belanja langsung sebesar Rp394 milyar</p>	<p>a. Aspek Akses: masyarakat belum bisa mengakses hasil Musrenbang</p> <p>b. Aspek Partisipasi: tidak semua pihak terlibat dalam Musrenbang (perwakilan stakeholders)</p> <p>c. Aspek Kontrol: -</p> <p>d. Aspek Manfaat: masyarakat belum merasakan manfaat langsung penyelenggaraan Musrenbang</p>	<p>1. keterbatasan jumlah aparatur perencana</p> <p>2. keterbatasan kemampuan keuangan untuk mengakomodasi usulan masyarakat</p>	<p>1. rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang</p>	<p>Penyempurnaan Rancangan RKPD melalui partisipasi Stakeholders dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2019</p> <p>Kegiatan 2 : Penggunaan aplikasi e-planning dalam penyelenggaraan Musrenbang</p> <p>Kegiatan 3 : Penyusunan perubahan juknis partisipatif yang mengakomodasi penggunaan e-planning</p>	<p>Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang</p>	<p>Input : Dana</p> <p>Output : Dokumen RKPD yang responsif gender</p> <p>Outcomes: meningkatnya peran stakeholders dalam penyelenggaraan stakeholders</p>

Solok, Maret 2018
 KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

JONEDI, SH, MM
 NIP. 19640614 199203 1 008



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20170 Fax. (0755) 20170
S O L O K

Kode Pos : 27314

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

Perangkat Daerah	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran	:	2019
Program	:	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Kode Program	:	4.03.4.03.01.27
Analisis Situasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Data pembuka wawasan<ul style="list-style-type: none">- Usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan tahun 2018 berjumlah 625 Usulan- Stakeholders yang terlibat dalam musrenbang RKPD berjumlah 101 stakeholder- Organisasi perempuan yang diundang dalam Musrenbang RKPD berjumlah 6 organisasi- Fasilitator perencana laki-laki berjumlah 27 orang- Fasilitator perencana perempuan berjumlah 18 orang- Aparatur perencana Bappeda berjumlah 32 orang- Proyeksi kemampuan keuangan untuk membiayai belanja langsung sebesar Rp394 milyar2. Isu dan faktor kesenjangan gender<ol style="list-style-type: none">a. Faktor kesenjangan<ul style="list-style-type: none">Aspek akses<ul style="list-style-type: none">- masyarakat belum bisa mengakses hasil MusrenbangAspek partisipasi<ul style="list-style-type: none">- tidak semua pihak terlibat dalam Musrenbang (perwakilan stakeholders)Aspek Manfaat<ul style="list-style-type: none">- masyarakat belum merasakan manfaat langsung penyelenggaraan Musrenbangb. Penyebab internal<ul style="list-style-type: none">- keterbatasan jumlah aparatur perencana- keterbatasan kemampuan keuangan untuk mengakomodasi usulan masyarakatc. Penyebab eksternal<ul style="list-style-type: none">rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang
Hasil/Tujuan	:	Penyempurnaan Rancangan RKPD melalui partisipasi Stakeholders dalam perencanaan pembangunan
Indikator Kinerja	:	Input : Dana Rp191.833.000,00

		<p>Output :</p> <p>Laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD</p> <p>Berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD yang berisi</p> <p>Outcomes :</p> <p>Meningkatnya peran stakeholders dalam penyelenggaraan stakeholders</p>									
Rencana Aksi	:	<table border="1"> <tr> <td>Kegiatan 1</td> <td colspan="2">Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2019</td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td colspan="2">Jumlah alokasi anggaran Rp191.833.000,00</td> </tr> <tr> <td>Output</td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD selama 3 hari - Pemberiaan penghargaan kepada kelurahan penyelenggara Musrenbang terbaik - Pemberian penghargaan kepada fasilitator perencanaan terbaik </td> </tr> </table>	Kegiatan 1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2019		Input	Jumlah alokasi anggaran Rp191.833.000,00		Output	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD selama 3 hari - Pemberiaan penghargaan kepada kelurahan penyelenggara Musrenbang terbaik - Pemberian penghargaan kepada fasilitator perencanaan terbaik 	
		Kegiatan 1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2019								
		Input	Jumlah alokasi anggaran Rp191.833.000,00								
		Output	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD selama 3 hari - Pemberiaan penghargaan kepada kelurahan penyelenggara Musrenbang terbaik - Pemberian penghargaan kepada fasilitator perencanaan terbaik 								
		<table border="1"> <tr> <td>Kegiatan 2</td> <td colspan="2">Penggunaan aplikasi e-planning dalam penyelenggaraan Musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td colspan="2">Jumlah alokasi anggaran</td> </tr> <tr> <td>Output</td> <td colspan="2">Implementasi e-planning dalam penyusunan perencanaan</td> </tr> </table>	Kegiatan 2	Penggunaan aplikasi e-planning dalam penyelenggaraan Musrenbang		Input	Jumlah alokasi anggaran		Output	Implementasi e-planning dalam penyusunan perencanaan	
		Kegiatan 2	Penggunaan aplikasi e-planning dalam penyelenggaraan Musrenbang								
		Input	Jumlah alokasi anggaran								
		Output	Implementasi e-planning dalam penyusunan perencanaan								
		<table border="1"> <tr> <td>Kegiatan 3</td> <td colspan="2">Penyusunan perubahan juknis partisipatif yang mengakomodasi penggunaan e-planning</td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td colspan="2">Jumlah alokasi anggaran</td> </tr> <tr> <td>Output</td> <td colspan="2">Juknis partisipatif yang telah dirubah</td> </tr> </table>	Kegiatan 3	Penyusunan perubahan juknis partisipatif yang mengakomodasi penggunaan e-planning		Input	Jumlah alokasi anggaran		Output	Juknis partisipatif yang telah dirubah	
Kegiatan 3	Penyusunan perubahan juknis partisipatif yang mengakomodasi penggunaan e-planning										
Input	Jumlah alokasi anggaran										
Output	Juknis partisipatif yang telah dirubah										
Total Anggaran	:	Rp191.833.000,00									

Solok, ^{Maret} 2018
KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,



JONEDI, SH, MM
NIP. 19640614 199203 1 008



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1**

KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 4.03.4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi	: 4.03. 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	: 4.03. 4.03.01.27 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Kegiatan	: 4.03. 4.03.01.27.01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Lokasi Kegiatan	: Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	: Rp 309,964,000.00
Jumlah Tahun n	: Rp 191,833,000.00
Jumlah Tahun n+1	: Rp -

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan tahunan	72%
Masukan	: Jumlah Dana	Rp. 191,833,000
Keluaran	: - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok Tahun 2019	3 hari
Hasil	: - Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD : - Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan	72% 72%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Perencana, Perangkat Daerah dan Stakeholders

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	BELANJA				191,833,000.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				191,833,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				191,833,000.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				7,792,000.00
5 2 2 01 1	Belanja alat tulis kantor				7,792,000.00
	- Kertas HVS F4	5	rim	55,000	275,000.00
	- Kertas HVS A4	5	rim	52,000	260,000.00
	- Catridge printer canon hitam	1	buah	294,000	294,000.00
	- Refill tinta canon hitam	3	buah	42,000	126,000.00
	- Refill tinta canon warna	3	buah	42,000	126,000.00
	- Pena biasa	5	buah	4,200	21,000.00
	- Stopmap Folio	5	buah	1,200	6,000.00
	- Binder klip kecil	2	kotak	4,000	8,000.00
	- Amplop biasa ukuran menengah	3	kotak	22,000	66,000.00
	- Catridge printer canon warna	1	buah	360,000	360,000.00
	- Alat tulis peserta musrenbang	250	Paket	25,000	6,250,000.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				2,701,000.00
5 2 2 03 13	Belanja spanduk	40.5	meter	42,000	1,701,000.00
	8,5 m X 3 m = 1 buah				
	6 m X 1,5 m = 1 buah				
	6 m X 1 m = 1 buah				
5 2 2 03 15	Belanja Dekorasi				1,000,000.00
	Belanja dekorasi	1	paket	1,000,000	1,000,000.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				14,750,000.00
5 2 2 06 1	Belanja Cetak				5,750,000.00
	- Buku Panduan	250	paket	10,000	2,500,000.00
	- Undangan	250	paket	7,000	1,750,000.00
	- Piagam penghargaan	6	lembar	250,000	1,500,000.00
5 2 2 06 2	Belanja Penggandaan				9,000,000.00
	- Fotocopy	45,000	Lembar	200	9,000,000.00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 11 1	Belanja makanan dan minuman				43,690,000.00
5 2 2 11 2	Belanja makanan dan minuman rapat persiapan musrenbang				4,090,000.00
	- Makan siang	120	Bks	18,500	2,220,000.00
	- Snack	220	Kotak	8,500	1,870,000.00
5 2 2 11 4	Belanja makanan dan minuman kegiatan				39,600,000.00
	Pelaksanaan Musrenbang				39,600,000.00
	- Sarapan	720	Kotak	15,000	10,800,000.00
	- Makan siang	720	Kotak	25,000	18,000,000.00
	- Snack	720	Kotak	15,000	10,800,000.00
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas				70,000,000.00
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				70,000,000.00
	- Sharing Informasi bagi Kelurahan Penyelenggara Musrenbang Terbaik	7	Paket	10,000,000	70,000,000.00
5 2 2 26 03	Belanja Jasa Pegawai Non PNS				300,000.00
5 2 2 26 03	Belanja jasa pegawai harian lepas / pasukan kuning				300,000.00
	- Biaya kebersihan tempat	6	OK	50,000	300,000.00
5 2 2 27 01	Belanja Jasa/ Kerjasama dengan pihak Ketiga				52,600,000.00
5 2 2 27 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber				8,300,000.00
	- Narasumber luar kota dalam provinsi				
	Professor	1	OM	2,000,000	2,000,000.00
	S.3 / Pejabat Negara	2	OM	1,750,000	3,500,000.00
	Narasumber dalam provinsi	2	OM	1,400,000	2,800,000.00
5 2 2 27 03	Belanja MC/Moderator/Pembaca Doa/Pemimpin Lagu				900,000.00
	- Pembaca Do'a	1	orang	100,000	100,000.00
	- Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	1	orang	100,000	100,000.00
	- Moderator	3	sesi	200,000	600,000.00
	- Pemimpin lagu	1	orang	100,000	100,000.00
5 2 2 27 04	Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi				3,000,000.00
	(Radio, media cetak, televisi, publikasi dan lainnya)				
	- Radio Siaran Langsung	1	kali	500,000	500,000.00
	- Radio Iklan	10	kali	250,000	2,500,000.00
5 2 2 27 49	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, masyarakat dan lainnya)				38,900,000.00
	- Transport Narasumber	2	OK	200,000	400,000.00
	- Transport peserta Musrenbang	250	OK	50,000	12,500,000.00
	- Sharing informasi perencanaan pembangunan daerah (stakeholders)	4	Paket	6,500,000	26,000,000.00
5 2 2 27 54	Belanja Motivasi/penghargaan				1,500,000.00
	Belanja Motivasi untuk Fasilitator Perencanaan Terbaik				1,500,000.00
	- Bidang Ekonomi	1	org	500,000	500,000.00
	- Bidang Prasarana Wilayah	1	org	500,000	500,000.00
	- Bidang Sosial Budaya	1	org	500,000	500,000.00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					191,833,000.00

Solok, Agustus 2018
KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

JONEDI, SH. MM
NIP.19640614 199203 1 008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	
1				1.....
2				2.....
3				3.....
4				4.....
5				5.....